PENGADILAN AGAMA BANGGAI

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode 31 Desember Tahun Anggaran 2021

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kec. Banggai Tengah

Kab. Banggai Laut - Sulawesi Tengah 94791

Telp. 0462-2705706 Fax. 0462-21544

e-mail : pa.banggai@yahoo.co.id

Jl. Ki Haja r Dewantara, Timbong
Banggai Utara, Sulawesi Tengah

LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Untuk Periode Tahun Anggaran 2021

BAGIAN ANGGARAN 005.04

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Ki Hajar Dewantara, Banggai

Telp. 0462-2705706 Fax. 0462-21544

Banggai Laut - Sulawesi Tengah 94791

e-mail : pa.banggai@yahoo.co.id

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banggai Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 28.432.500. atau mencapai 71,80 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 39.600.000

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp. 25.485.000 atau mencapai 63,78 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 39.958.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp 0 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 0; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp. 0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 28.432.500,

sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 57.055.200 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (28.622.700) Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 0 dan sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp (28.622.700)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp . 0 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp (28.622.700) ditambah dengan koreksi- koreksi senilai Rp. 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 28.622.700 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp. 0.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan basisakrual.

PENGADILAN AGAMA BANGGAI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2021		% thd Angg	TA 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	39.600.000	28.432.500	71,80	25.485.000
JUMLAH PENDAPATAN		**39.600.000**	**28.432.500**	**71,80**	**25.485.000**
BELANJA	**B.2.**				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0,00	-
Belanja Barang	B.4	56.366.000	56.277.000	99,84	51.521.000
Belanja Modal	B.5	-	-	0,00	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		**56.366.000**	**56.277.000**	**99,84**	**51.521.000**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

PENGADILAN AGAMA BANGGAI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	-	-
Jumlah Aset Lancar		0	0
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0	0
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	-	-
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19		-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	-	-
Jumlah Aset Tetap		0	0
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		**0**	**0**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		0	0
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	-	-
JUMLAH EKUITAS		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**0**	**0**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

PENGADILAN AGAMA BANGGAI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(*Dalam Rupiah*)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	28.432.500	25.485.000
JUMLAH PENDAPATAN		**28.432.500**	**25.485.000**
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	778.200	558.415
Beban Barang dan Jasa	D.4	3.277.000	4.781.000
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	53.000.000	46.740.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		**57.055.200**	52.079.415
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(28.622.700)**	**(26.594.415)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		**0**	**0**
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		**(28.622.700)**	**(26.594.415)**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

PENGADILAN AGAMA BANGGAI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	E.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(28.622.700)	**(26.594.415)**
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		**0**	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	28.622.700	**26.594.415**
EKUITAS AKHIR	E.5	**0**	**0**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan AgamaBanggai

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Pengadilan Agama Banggai didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Entitas berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantara No.1, Banggai Laut, Sulawesi Tengah.

Pengadilan Agama Banggai mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Pengadilan Agama Banggai berkomitmen dengan visi *"TerwujudnyaPengadilan Agama Banggai sebagai Lembaga Peradilan Tingkat Pertama Yang Agung dan Berwibawa."* Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Meningkatkan penyelesaian perkara.
- Meningkatkan aksesibilitas putusan hakim yang berkualitas.
- Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

- Meningkatkan aksepibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).
- Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- Meningkatkan kualitas pengawasan.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Banggai. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Banggai menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Banggai dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Banggai. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banggai adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening

Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi Berdasarkan organisasi dan fungsi akan Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut

didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

  a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

  b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

  c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa

kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

PenyusutanAset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat

Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai

tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2017 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	**Masa Manfaat (tahun)**
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  a. Kewajiban Jangka Pendek

     Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

     Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

  b. Kewajiban Jangka Panjang

     Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Banggai telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal yaitu berupa revisi POK yang tidak merubah nilai pagu.

Realisasi PendapatanRp. 28.432.500

Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 28.432.500 atau mencapai 71,80 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 39.600.000. PendapatanPengadilan Agama Banggai terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	39.600.000	28.432.500	71,80
Pendapatan Lain-lain	0	0	0
Jumlah	**29.386.000**	**15.344.200**	71,80

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2021 mengalami Penaikan dibandingkan TA 2020. Selain itu, Pendapatan Lain-lain Kantor Pengadilan Agama Banggai juga mengalami penurunan sebesar 100 persen yang berasal antara lain dari penerimaan kembali persekot/uang muka gaji.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	28.432.500	25.485.000	8,02
Pendapatan Lain-lain	0	0	
Jumlah	**28.432.500**	**25.485.000**	**8,02**

Realisasi Belanja Negara Rp 56.277.000

Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2021 adalah sebesar Rp. 56.277.000 atau 99,84 % dari anggaran belanja sebesar Rp 56.366.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2021

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	56.366.000	56.277.000	99,84
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	**56.366.000**	**56.277.000**	99,84
Pengembalian		-	-
Jumlah	**56.366.000**	**56.277.000**	99,84

Dibandingkan dengan TA 2021, Realisasi Belanja TA 2020 mengalami Kenaikan sebesar 0,35% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

- Penurunan pengadaan belanja modal diikuti dengan penurunan belanja barang untuk mendukung rencana strategis yang dimulai pada TA 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	56.277.000	51.521.000	0,35
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	**56.277.000**	**51.521.000**	**0,35**

Belanja Pegawai

Rp. 0

Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintahyang belum berstatus PNSsebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar 0 persen dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Adanya mutasi keluar beberapa pegawai dan tidak diimbangi dengan mutasi masuk pegawai, sehingga jumlah pegawai mengalami penurunan.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	-
Belanja Honorarium	0	0	-
Belanja Lembur	-	-	-
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**0**	**-**
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	**0**	**0**	**-**

Belanja Barang Rp.56.277.000

Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 56.277.000 dan Rp. 51.521.000. Realisasi Belanja Barang TA 2021 mengalami penaikan 0,35 % dari Realisasi Belanja Barang TA 2020. Hal ini antara lain disebabkan oleh menurunnya belanja barang non operasional dan belanja pemeliharaan kantor.

Perbandingan Belanja Barang TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	56.277.000	51.521.000	0,35
Belanja Barang Non Operasional	-	41.520.000	-
Belanja Jasa	-	-	-
Belanja Pemeliharaan	-	-	-
Belanja Barang Persediaan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**56.277.000**	**51.521.000**	**0,35**
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	**56.277.000**	**51.521.000**	**0,35**

Belanja Modal Rp. 0

Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset

tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar 0 dibandingkan TA 2020 disebabkan oleh menurunnya anggaran yang diberikan oleh pusat sehubungan dengan pengadaan untuk memperoleh asset tetap.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal

TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**0**	**0,00**
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	**0**	**0**	**0,00**

Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Realisasi tersebut pada TA 2021 tidak mengalami perubahan dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan tidak ada penambahan tanah yang akan digunakan sebagai sarana pada Pengadilan Agama Banggai.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah

TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**0**	**0,00**
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	**0**	**0**	**0,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 adalah sebesar Rp.0, mengalami penurunan sebesar 0 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp. 0. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pengadaan yang diberikan oleh pusat yang diikuti dengan berkurangnyapengadaan peralatan dan mesin sebagai fasilitas kantor.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Komputer Unit	0	0	0,00
Peralatan Komputer	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**0**	**0,00**
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	**0**	**0**	**0,00**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan TA 2020 adalah masing - masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Realisasi Belanja Modal TA 2021 tidak mengalami perubahan dibandingkan Realisasi TA 2020. Hal ini diakibatkan baik TA 2021maupun TA 2020 tidak ada pengadaan belanja modal gedung dan bangunan.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan

TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A 2020	NAIK (TURUN) %
Gedung Tempat Kerja	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	**0**	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	**0**	**0**	0,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tidak terdapat realisasi Belanja Modal TA 2021 maupun TA 2020. Hal ini disebabkan tidak ada belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada tugas dan fungsi pada badan peradilan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**0**	**0,00**
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	**0**	**0**	**0,00**

Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2021 tidak mengalami perubahan dibandingkan Realisasi TA 2020. Hal ini disebabkan tidak ada belanja modal lainnya baik pada TA 2021 maupun pada TA 2020.

Belanja Bantuan Sosial Rp. 0

Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada TA 2021 tidak mengalami perubahan dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan oleh karena belanja bantuan sosial bukan merupakan tugas pokok dan fungsi pada badan peradilan.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0

Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.Rincian Kas di Bendahara Pengeluaranadalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

TA 2021 dan 2020

Keterangan	TH 2021	TH 2020
Uang Tunai	0	0
Bank BRI	-	-
Jumlah	**0**	**0**

Kas di Bendahara PenerimaanRp. 0

Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar masing-masing Rp. 0 dan Rp. 0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

TA 2021 dan 2020

Keterangan	TH 2021	TH 2020
Uang Tunai	-	-
Bank	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnyadan Setara Kas Rp. 0

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2021 dan 2020

Keterangan	TH 2021	TH 2020
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Piutang PNBPRp. 0

Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0. dan Rp. 0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP TA 2021 dan 2020

Uraian	TH 2021	TH 2020
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Rp. 0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2021 dan 2020

No	Nama	TH 2021	TH 2020
1		0	0
Jumlah		**0**	**0**

Bagian Lancar TagihanPenjualan Angsuran

Bagian LancarTPA Rp. 0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, denganrincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA TA 2021 dan 2020

No	Nama	TH 2021	TH 2020
1		-	-
Jumlah		**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tak Tertagih -Piutang Lancar

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang LancarRp.0

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing

debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar TA 2021 dan 2020

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	**-**	-	**-**
Bagian Lancar TP/TGR		-	
Lancar	-		-
Kurang Lancar	-		-
Diragukan			-
Macet			-
Jumlah	**-**		**-**
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-		-
Kurang Lancar	-		-
Diragukan			-
Macet			-
Jumlah	**-**		**-**
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	**-**		**-**

Belanja Dibayar diMuka Rp. 0

Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2021 dan 2020

Jenis	TH 2021	TH 2020
Pembayaran Internet	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp. 0

Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0, merupakan hak negara atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2021 dan 2020

Jenis	TH 2021	TH 2020
	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Persediaan Rp.0

Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing- masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2021 dan 2020

Jenis	TH 2021	TH 2020
Barang Konsumsi	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan TP/TGRRp. 0

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2021 dan 2020

No	Debitur	TH 2021	TH 2020
1		-	-
Jumlah		-	-

Tagihan Penjualan Angsuran Rp. 0

Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA TA 2021 dan 2020

No	Debitur	TH 2021	TH 2020
1		-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Rp. 0

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing- masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang TA 2021

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	**-**	-	**-**
Tagihan PA		-	
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan		-	-
Macet		-	-
Jumlah	**-**		**-**
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	**-**		**-**

Tanah Rp. 0

Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Banggai per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesarRp. 0 dan Rp. 0. Kenaikan nilai aset tetap Tanah berasal

dari revaluasi aset tanah di Tahun 2021. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	**0**
Mutasi tambah:	
Revaluasi asset	0
Pembelian	0
Mutasi kurang:	0
Revaluasi asset	-
Saldo per 30 Juni 2018	**0**

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2021 adalah sebagaiberikut:

Rincian Tanah TA 2021

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	1.909 m2	Jl. Ki Hajar Dewantara, Desa Timbong	-
2	528 m2	Jl. Pattimura No. 32, Kel. Lompio	-
Jumlah			**-**

Peralatan dan Mesin Rp. 0

Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp. 0 dan Rp. 0. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	**0**
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2021	**0**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	0
Nilai Buku per 31 Desember 2021	**0**

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

Gedung dan Bangunan Rp. 0

Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp 0 dan Rp . Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagaiberikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	**-**
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi kurang:	-
Revaluasi asset	-
Saldo per 31 Desember 2021	**-**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	**-**

Transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berasal dari revaluasi aset senilai Rp. 0

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan,Jaringan dan Irigasi Rp.0

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

PendapatanPNBP Rp. 28.432.500

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Jumlah Pendapatan untukperiode yang berakhirpada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 28.432.500 dan Rp 25.485.000

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	**-**
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2021	**-**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	**-**

Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya Rp. 0

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp. 0 dan Rp. 0.Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2021, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	**0**
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 31 Desember 2021	**0**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	0
Nilai Buku per 31 Desember 2021	**0**

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi Dalam PengerjaanRp. 0

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2021 dan2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan pembangunan gedung tempat kerja berupa perpustakaan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp.0

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp. 0 dan Rp 0.Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutanselain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

TA 2021

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		**0**	**0**	**0**

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak Berwujud Rp. 0

Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp 0 dan Rp 0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat di identifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Pengadilan Agama Banggai berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	**-**
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 201	**-**
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2021	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	**-**

Tidak terdapat baik mutasi tambah maupun mutasi kurang pada Tahun 2021.

Aset Lain-LainRp. 0

Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp 0 dan Rp 0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Tidak terdapat mutasi baik mutasi tambah maupun mutasi kurang pada TA 2021.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan / Amortisasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp. 0 dan Rp. 0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra

Aset Lainnya Rp.0

akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutandan
Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	**0**	**0**	**0**

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Rp 25.000.000

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 25.000.000 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepadaPihak Ketiga Rp. 0

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan2020 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.0. Utang

kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Pengadilan Agama Banggaiper tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

RincianUtang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
.	.	.
Total	.	

Pendapatan Diterima di Muka

PendapatanDiterima di Muka Rp. 0

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021 dan2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah
-	-
Total	-

Tidak terdapat pendapatan diterima dimuka baik Tahun 2021 maupun Tahun 2020.

Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp. 0

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp. 0 dan Rp. 0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya

Ekuitas

C.28 Ekuitas

Rp.0

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA2021 dan 2020

URAIAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	0	0
Pendapatan lain-lain	0	0	0
Jumlah	**0**	**0**	0

Pendapatan penerimaan Negara bukan pajak berasal. Pendapatan Lain-Lain merupakan penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu.

Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp. 0

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintahkecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2021 dan 2020

URAIAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	0	0	0
Beban Tunjangan-tunjangan	0	0	0
Beban Lembur	-	0	0
Jumlah	**0**	**0**	0

Beban Persediaan Rp 778.200

Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 778.200 dan Rp 558.415. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang- barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2021 dan 2020

URAIAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	778.200	558.415	0
Jumlah	**0**	**0**	0

Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Rp. 3.277.000

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 3.277.000 dan Rp. (1.504.000) Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya tambahan beban keperluan perkantoran.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	0	0	0,00
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0	0	0,00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	0	0,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	0	0,00
Beban Barang Operasional Lainnya	3.277.000	4.781.000	(31,45)
Beban Langganan Listrik	0	0	0,00
Beban Langganan Telpon	0	0	0,00
Beban Langganan Air	0	0	0,00
Jumlah	**3.277.000**	**4.781.000**	0,00

Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp. 0

Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Jumlah	**0**	**0**	0,00

Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp. 53.000.000

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 53.000.000 dan Rp. 46.740.000. Beban tersebut merupakan beban yang

terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan beban perjalanan dinas disebabkan oleh berkurangnya frekuensi rapat koordinasi pada TA 2021.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	53.000.000	46.740.000	13,39
Beban perjalan dinas dalam kota	0	0	0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Baranguntuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp. 0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Banggaitidak mempunyai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
-	0	0	0,00
Jumlah	**0**	**0**	0,00

Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Rp. 0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Penurunan beban bansos karena adanya penghematan alokasi anggaran. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	% NAIK (TURUN)
-	0	0	0,00
Jumlah	**0**	**0**	**0,00**

Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan AmortisasiRp. 0

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

TA 2021 dan 2020

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	0	0	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	-
Jumlah Penyusutan dan Amortisasi	**0**	**0**	-

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp. 0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	0,00
Jumlah	**0**	**0**	0,00

Kegiatan Non Operasional

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp. 0

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2021 dan 2020

URAIAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
-	0	0	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**0**	**0**	0,00

**)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

Pos Luar Biasa

Pos Luar BiasaRp. 0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untukTahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2021 dan 2020

URAIAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
-	0	0	0,00
Jumlah	**0**	**0**	0,00

Tidak terdapat pos luar biasa baik Tahun 2021 maupun pada Tahun 2020.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp. 0

Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

E.2Surplus (Defisit) LO

Defisit LO Rp. (28.622.700)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp 28.622.700 dan Rp 26.594.415. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3KoreksiYang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Penyesuaian Nilai Aset

PenyesuaianNilai Aset Rp. 0

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Rp.0

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pecatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaaan

Jenis Persediaan	Koreksi
-	-
Jumlah	**-**

Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp. 0

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Revaluasi Aset tersebut berasal dari revaluasi sebidang tanah milik satker di Jl. Pattimura No. 32, Banggai dan gedung dan bangunan di Jalan Ki Hajar Dewantara, Banggai.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

KoreksiAset Tetap Non Revaluasi Rp. 0

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
-	-
Jumlah	**-**

Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain Rp. 0

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tidak terdapat koreksi lain-lain pada Tahun 2019.

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
-	-
Jumlah	**-**

E.4Transaksi Antar Entitas

TransaksiAntar Entitas Rp 28.622.700

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 28.622.700 dan Rp 26.594.415. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(28.432.500)
Ditagihkan ke Entitas Lain	59.277.000
Transfer Masuk	778.200
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	**28.622.700**

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan keEntitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DDEL sebesar Rp. (Rp 28.432.500) sedangkan DKEL sebesar Rp. 59.277.000

Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 778.200 terdiri dari:

RincianNilai Transfer Masuk/Kelar

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	-	-	-
	Jumlah		**-**

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0

Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian

Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0-. dari total Rp. 0,- yang diterima sepanjang tahun 2021.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp. 0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	-	-	Rp -
2	-	-	Rp -
Total Pengesahan			**Rp -**
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			**Rp -**

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2021 disajikan pada lampiran.

E.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Rp. 0

Nilai Ekuitas pada tanggal 31Desember 2021 dan 2020 adalahmasing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

Kejadian-Kejadian PentingSetelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LA

Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK terhadap Laporan Keuangan semester ini maupun pada Laporan Keuangan tahun lalu.

Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual akan diungkapakan pada Semester II Tahun Anggaran 2019

Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Banggai adalah:

1. PT. BRI (Persero) KCP Banggai Kepulauan A/C 0647-01-000023-30-3 a.n. BPG 053 PA BANGGAI yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 0. Perubahan nama rekening sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tanggal
   30 Desember 2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.
2. PT. BRI (Persero) KCP Banggai Kepulauan A/C 0647-01-000094-30-4 a.n. BPG 053 PA BANGGAI yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.0. Perubahan nama rekening sesuai denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Rekening Milik KementerianNegara/Lembaga/Satuan Kerja.

3. PT. BRI (Persero) KCP Banggai Kepualauan A/C 0647-01-000406-30-7 a.n. RPL 053 PA Banggai Utk PDT Biaya Perkara yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.0. Pembukaan rekening lainnya penampung biaya perkara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga Satuan Kerja.

Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Tidak Ada Revisi Anggaran 2021

Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat ralat/koreksi SPM Pada Belanja Barang

Catatan Penting Lainnya

Tidak terjadi perubahan Pejabat Perbendaharaan pada 31 Desember 2021.